

KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA SEPTEMBER 2011 HARI ULANG TAHUN MPR/DPR KE 66

Kegiatan DPR minggu kedua September 2011, terfokus pada acara Rapat Paripurna DPR RI Peringatan HUT Ke-66 MPR/DPR-RI dan Laporan Kinerja DPR-RI Tahun Sidang 2010-2011 yang mengambil tema: **“Komitmen DPR-RI terhadap Peningkatan Kapasitas Kelembagaan”**. Berikut ringkasan Pidato Ketua DPR pada Rapat yang berlangsung pada 6 September 2011 tersebut.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H Marzuki Alie

Pidato Ketua DPR dalam HUT MPR/DPR-RI diawali dari gambaran singkat tentang perjalanan Parlemen Negara Republik Indonesia sejak tahun 1945. Lembaga Perwakilan Rakyat terus mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan perkembangan perubahan ketatanegaraan. Sejak tahun 1950 sempat terbentuk DPR dan Senat RIS, DPR-Sementara, dan DPR Gotong Royong. Peran lembaga perwakilan rakyat pada era ini, tidak menunjukkan jati dirinya karena fungsinya lemah dalam mengawasi jalannya Pemerintahan. Pada masa Orde Baru, keberadaan lembaga perwakilan rakyat juga tidak mengalami perubahan substansial.

Baru pada era reformasi, setelah UUD 1945 mengalami empat kali amandemen, struktur ketatanegaraan banyak berubah. Penyempurnaan atas bangunan struktur ketatanegaraan mengarah kepada terciptanya mekanisme *check and balances* antar lembaga negara, khususnya antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. DPR, selain memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, beberapa hak DPR yang diatur dalam amandemen kedua UUD 1945 adalah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Pelaksanaan fungsi legislasi Tahun Sidang 2010—2011,



merupakan kelanjutan dari tahun sidang sebelumnya. Penetapan Prolegnas tahunan 2010 meliputi 70 RUU dan tahun Sidang 2011 berjumlah 91 RUU. Selama tahun 2011 sampai akhir Masa Persidangan IV, telah dilakukan pembahasan terhadap 23 RUU, 10 RUU di antaranya telah disetujui menjadi UU.

Kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU bersifat teknis dan non-teknis. Kendala teknis antara lain berkaitan dengan sempitnya waktu pembahasan. Sementara, kendala non-teknis berkaitan sulitnya memperoleh penyamaan pendapat antara DPR dan Pemerintah dalam hal substansi yang akhirnya menjadi materi yang cukup krusial.

Upaya mengoptimalkan fungsi legislasi antara lain, Pimpinan Dewan ikut menangani langsung beberapa RUU, konsultasi intensif dengan fraksi-fraksi dan AKD, bahkan konsultasi dengan Presiden. Keterlibatan ini tidak hanya dalam menyepakati substansi, tetapi juga dalam hal mekanisme dan prosedur untuk percepatan penyelesaian RUU.

DPR-RI meminta kepada Pemerintah untuk lebih kooperatif, utamanya dalam pembahasan atas RUU yang berasal dari DPR sejak tahap penyampaian Surpres hingga akhir pembahasan. Hal tersebut menjadi sangat penting, mengingat semua pembahasan RUU harus mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden sebagaimana amanat UUD 1945.

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; **PENANGGUNG-JAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991



Jajaran Pimpinan DPR RI dan anggota DPR RI saat foto bersama pada acara HUT DPR RI Ke-66

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Pada Masa Persidangan I sampai IV 2010-2011, telah diselesaikan pembahasan terhadap RUU tentang APBN 2011, dan telah diundangkan menjadi UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011. Dewan juga telah menyelesaikan pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011, dan telah diundangkan menjadi UU No. 11 Tahun 2011. Selama Tahun Sidang 2010-2011, Dewan telah menyelesaikan pembahasan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009, dan telah diundangkan menjadi UU No. 7 tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009.

Dalam proses pembahasan di tingkat I, Badan Anggaran memperhatikan pertimbangan DPD-RI, hasil telaahan BAKN atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2009, dan hasil pembahasan Laporan Keuangan Negara dari Komisi-Komisi DPR.

DPR telah menyelesaikan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN tahun 2010. Pada tanggal 23 Agustus, RUU ini telah mendapatkan persetujuan dengan beberapa masukan rekomendasi dari Badan Anggaran terhadap hasil pembicaraan tingkat I. Rekomendasi yang diberikan antara lain, Pemerintah diminta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan, terutama Kementerian/Lembaga yang masih mendapat opini audit "tidak menyatakan pendapat" dan yang opininya menurun dari tahun sebelumnya. Pemerintah diminta menindaklanjuti Rekomendasi BPK berkaitan

dengan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2010 yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, dan segera menyelesaikan penyempurnaan perundang-undangan di bidang PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang sudah tidak sesuai dengan UU di bidang Keuangan Negara, serta memberikan sanksi kepada Kementerian/Lembaga yang mengelola PNB di luar mekanisme APBN.

Masa Sidang I Tahun Sidang 2011-2012, sedang diproses pembahasan atas RUU APBN Tahun Anggaran 2012 dan Nota Keuangannya. RUU ini akan diselesaikan pada akhir bulan Oktober, dua bulan sebelum UU APBN 2012 berlaku. Pembahasan anggaran negara dilakukan sepanjang tahun, didahului Pembicaraan Pendahuluan, Laporan Semester yang merupakan bentuk pengawasan atas APBN, Pembahasan APBN Perubahan, Laporan Pertanggungjawaban APBN dan RUU APBN berikut Nota Keuangannya.

Dewan menyarankan agar sistem dan prosedur terhadap pelaksanaan APBN tidak membelenggu sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam kebijakan anggaran Negara.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

DPR melakukan fungsi pengawasan melalui beberapa kegiatan. Salah satunya adalah melalui Tim-tim Pengawas. [1] Masa kerja Tim Pengawas Century diperpanjang selama 1 tahun. Dari beberapa kali Rapat Kerja Timwas Century, telah dibahas 2 hal penting yaitu pelaksanaan Audit Forensik dan pelaksanaan *Cross Examination*. [2] Timsus DPR terhadap Penanganan TKI di Saudi Arabia, mendesak

Pemerintah untuk melakukan kajian terhadap moratorium pengiriman TKI tidak terampil khususnya ke seluruh negara di wilayah Timur Tengah. Meminta Pemerintah membentuk *Task Force* dengan penugasan khusus menangani 303 TKI yang terancam hukuman mati. [3] Tim Pengawas Otonomi Khusus Aceh dan Papua, menemukan adanya proyek pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang belum terealisasi secara optimal dan menemukan bahwa terdapat penyimpangan Dana Otsus Papua sebagai hasil audit BPK. [4] Tim-Tim Pengawas DPR RI terhadap Penanggulangan Bencana Alam di Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Jambi, secara intensif berkoordinasi dalam rangka menangani pemulihan pasca bencana alam, serta melakukan kunjungan secara langsung.

Selain itu, Selama masa persidangan I sampai dengan IV, DPR RI antara lain telah membentuk beberapa Panitia Kerja (Panja) melalui keputusan Komisi-Komisi sebagai Alat Kelengkapan Dewan. Fungsi pengawasan DPR-RI juga dilakukan melalui kunjungan kerja Komisi-Komisi DPR ke daerah dan kunjungan perorangan.

Pengaduan Masyarakat

Sejak Agustus 2010 hingga Juli 2011, pengaduan dan aspirasi masyarakat yang cukup menonjol terkait masalah pertanahan dan hukum. Total surat pengaduan yang masuk ke Pimpinan DPR-RI dalam satu tahun sidang sebanyak 1.525 surat. Pengaduan melalui website sebanyak 1.347 dan sudah diteruskan kepada AKD-DPR sebanyak 448 aspirasi selama kurun waktu Masa Sidang I sampai III. Khusus untuk Masa Sidang IV, DPR menindaklanjuti pengaduan melalui website dengan skala prioritas. Sedangkan melalui pesan singkat sejak Mei sampai Juli 2011 sebanyak 1.523 aspirasi. Untuk memproses pengaduan tersebut, DPR menggunakan skala prioritas dengan tetap menganggap penting semua pengaduan.

Diplomasi Parlemen

Peran DPR dalam pergaulan antarbangsa juga telah diupayakan untuk ditingkatkan dari tahun ke tahun. DPR-RI sukses menyelesaikan amanah sebagai Presiden Asian Parliamentary Assembly dan Forum of Asia Pasific Parliamentarians for Education. Sekarang diberi kepercayaan untuk memegang posisi Chair of Asia Pacific Geopolitical Group (APG) IPU 2010-2011, First Vice-President of IPU Women Coordinating Committee, Anggota Tetap Committee of Middle East Question IPU, Anggota Tetap International Humanitarian Laws Committee, focal point untuk United Nations Convention to Combat Dessertification (UNCCD) dan untuk masalah HIV/AIDS di badan kesehatan PBB, Wakil Presiden PUIC 2010-2012, Presiden PUIC Conference 2012-2013, dan anggota Preparatory Committee untuk World Conference Speaker of Parliaments. Di luar jalur formal, sejumlah anggota DPR aktif merespon atas berbagai isu internasional melalui kaukus-kaukus, seperti Kaukus Parlemen Indonesia untuk Palestina dan Kaukus antarparlemen ASEAN untuk Myanmar.

Kiprah diplomasi Anggota DPR ini tidak saja melengkapi diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah, tetapi justru dapat memperkuat dan bahkan dapat turut memainkan peran penting dan efektif dalam pencapaian diplomasi Indonesia.



Peningkatan Supporting System

DPR-RI periode 2009—2014 berupaya untuk memperbaiki kinerja, sebagaimana dituangkan dalam Renstra DPR 2010—2014. Renstra DPR 2010—2014 memiliki agenda penguatan kelembagaan, utamanya mengoptimalkan dukungan substansial/keahlian kepada DPR agar produk-produk yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, baik konsep maupun praktis. DPR merencanakan membangun Badan Fungsional Keahlian, juga mendorong terlaksananya proses reformasi di lingkungan kesetjanaan dan upaya pembentukan Unit Pengawas Internal.

Kritik masyarakat terhadap kunjungan ke luar negeri, ditanggapi dengan dilakukannya pembenahan internal, yaitu kebijakan memperketat perizinan untuk melakukan Kunjungan Kerja ke luar negeri bagi Komisi-Komisi dan Panitia Khusus. Izin Kunjungan Kerja ke Luar Negeri hanya diberikan kepada Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), khususnya untuk menghadiri sidang-sidang internasional dan Komisi I, sesuai dengan tugasnya.

Pada tanggal 29 Maret 2011 telah disahkan Peraturan DPR tentang Kode Etik dan Peraturan DPR tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR. Diharapkan, dengan Kode Etik yang baru dan Peraturan DPR tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR maka, badan ini efektif melakukan tugasnya.

Apresiasi kepada jajaran Sekretariat Jenderal perlu disampaikan karena telah mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2009 dan 2010. Diharapkan, capaian ini dapat dipertahankan untuk tahun-tahun mendatang.*

Perlu Kebijakan Strategis dan Sinergis Atasi Permasalahan Mudik

Mudik Lebaran yang menjadi tradisi tahunan dari tahun ke tahun kondisinya masih saja menuai permasalahan. Apabila tidak dicarikan solusi permasalahannya, dikhawatirkan di tahun-tahun mendatang kondisinya semakin memburuk. Untuk itu, diperlukan kebijakan-kebijakan yang strategis dan sinergis yang melibatkan seluruh stakeholders di bidang transportasi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said saat membuka rapat dengar pendapat dengan Dirjen-Dirjen Kementerian Perhubungan, Dirjen Bina Marga, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Karorlantas Mabes Polri, Dirut PT KAI, Dirut PT ASDP, dan Dirut PT, Jasa Marga, Kamis (8/9) di gedung DPR.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi setiap datangnya arus mudik seperti kemacetan, kurangnya kapasitas angkutan umum yang berakibat pada kenaikan tarif dan menurunnya kualitas pelayanan selalu saja terjadi setiap tahun. Bahkan yang paling mendasar aspek keselamatan yang seringkali terabaikan. "Permasalahan tersebut terjadi dari tahun ke tahun tanpa perbaikan yang signifikan," katanya.

Muhidin menyayangkan, meningkatnya jumlah pemudik yang mendominasi dengan kendaraan pribadi dibandingkan dengan menggunakan moda angkutan umum. Disinilah permasalahan kemacetan itu muncul.

Data Posko Angkutan Tingkat Nasional Angkutan Lebaran terpadu tahun 2011 menunjukkan bahwa peningkatan yang cukup signifikan hanya terjadi pada moda angkutan laut yang mengalami peningkatan sebesar 117 persen dan angkutan udara sebesar 25 persen.

Sedangkan moda angkutan jalan (bus) mengalami penurunan sebesar 10 persen, moda angkutan penyeberangan hanya meningkat sebesar 3 persen.

Yang sangat disayangkan lagi, kata Muhidin, moda angkutan kereta api yang sebenarnya merupakan moda transportasi ideal yang dapat mengangkut penumpang secara massal dalam jarak jauh dengan tingkat keselamatan tinggi ternyata mengalami jumlah penurunan penumpang sebe-



Jajaran Kementerian Perhubungan saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR membahas permasalahan mudik

sar 22 persen.

Beberapa dugaan penyebab menurunnya penumpang moda kereta api ini antara lain akibat adanya kebijakan pembatasan penumpang setiap gerbong serta keterbatasan jumlah lokomotif dan gerbong yang ada serta kebijakan KA yang memasang gerbong kosong di depan dan di belakang rangkaian KA.

Muhidin juga memprihatinkan tingginya angka kecelakaan yang terjadi di tahun 2011. Data kecelakaan lalu lintas Operasi Ketupat (Polri) tanggal 23 Agustus – 4 September 2011 menunjukkan peningkatan terjadinya kecelakaan yang sangat besar yaitu sebesar 33,08 persen. Pada tahun 2010 terjadi 3.010 kasus kecelakaan, sementara tahun 2011 terjadi 4.006 kasus kecelakaan.

Walaupun angka fatalitas yang meninggal dunia berkurang, namun se-

cara keseluruhan jumlah korban luka berat dan luka ringan lebih besar dari tahun sebelumnya.

Muhidin juga menyayangkan adanya perbedaan data jumlah angka kecelakaan dan korban dari berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Polri, Jasa Raharja dan lain-lain. Ke depan dia berharap, terdapat data yang terintegrasi dan terpadu yang bersumber dari Pemerintah.

Untuk itulah Komisi V DPR perlu segera mengundang pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang komprehensif mengenai hasil penyelenggaraan angkutan lebaran 2011. Evaluasi mudik lebaran ini perlu dilakukan, agar masing-masing pihak terkait dapat meningkatkan kinerjanya dan mencari solusi bagi perbaikan mudik lebaran di tahun mendatang. (tt) foto:tt/parle

Ketua DPR Nilai Korupsi Tokoh Muda Telah Mengalahkan Seniornya

Beberapa kasus korupsi yang berhasil diungkap aparat penegak hukum menunjukkan kecenderungan semakin banyak tokoh muda yang terjerat kejahatan luar biasa ini.



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat memberikan penjelasan kepada pers

Fenomena ini memprihatinkan karena faktanya sangat jelas kejahatan korupsi yang dilakukan jauh lebih kompleks bahkan mengalahkan kasus korupsi yang pernah dilakukan para seniornya.

“Saya prihatin kasus-kasus korupsi sekarang sudah banyak dilakukan oleh orang muda, itu clear dan tidak kecil jumlahnya, mengalahkan para senior tokoh-tokoh korupsi yang sudah berpengalaman, ini luar biasa, ini fenomena yang memprihatinkan, ada sesuatu yang salah,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menutup Konferensi Nasional Perserikatan Organisasi Kepemudaan Tingkat Nasional (*Poknas*) di Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/9).

Ia juga mencermati semakin sulit menemukan kegiatan kepemudaan dalam rangka kompetisi visi kepemimpinan yang tidak menggunakan uang.

Kecenderungan perpecahan ini juga terjadi pada organisasi lain termasuk partai politik, yang gagal menegakkan AD/ART. Pada akhirnya setiap pelaksanaan kongres terjadi perpecahan karena mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan. Baginya hal ini jelas akan merusak jalannya bangsa sehingga diperlukan langkah terobosan untuk menuntaskannya.

“Perlu ada upaya konkrit untuk membebrantas korupsi, terobosan, kalau tidak negara ini akan menuju kehancuran. Yang jelas hancur moral dan akhlak, otomatis negara hancur,” tandas Marzuki. Ia juga memaparkan hasil pertemuannya

dengan mantan Presiden Habibie yang menyimpulkan bangsa ini memerlukan tokoh yang memiliki idealisme, komitmen dan kejujuran. Tidak perlu lagi terjebak dikotomi tokoh tua atau muda, yang paling utama adalah siapa yang memiliki komitmen.

Salah satu langkah terobosan yang dapat dilakukan menurutnya menyiapkan tiga aturan perundang-undangan yaitu RUU yang mengatur sanksi berat bagi koruptor, RUU Pembuktian Terbalik serta RUU tentang pembatasan transaksi kas. Akan tetapi penuntasan tiga RUU penting ini tidak akan pernah berhasil apabila dilakukan oleh orang-orang yang tersandera pernah melakukan korupsi.

“Bagaimana orang mengesahkan hukuman mati bagi koruptor kalau yang membahasnya tersandera pernah melakukan korupsi, gimana mau

mengesahkan Undang Undang Pembuktian Terbalik kalau harta yang membahas tidak jelas. Jadi pengawalinya harus berani melakukan terobosan, perlu dimulai dengan pemutihan,” imbuah politisi Partai Demokrat ini.

Ketua DPR meminta pemuda dapat memainkan perannya sebagai inisiator, motivator sekaligus aktor untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Baginya sekarang ada momentum luar biasa untuk kebangkitan negeri ini, ketika negara Eropa sedang kepayahan menghadapi terpaan krisis global. Beberapa pihak siap mengalihkan dana mereka ke Indonesia yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat berubah menjadi malapetaka.

Perpecahan KNPI

Dalam pertemuan tersebut Ketua DPR RI Marzuki Alie memberikan kesempatan dialog kepada para pemuda peserta konferensi yang berasal dari 47 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Edy Jauzie Muhsin Bafadal, Sekjen Gerakan Pemuda Kabah meminta perhatian seringnya proposal yang diajukan OKP tidak mendapat perhatian yang layak dari instansi terkait.

Ia juga mengeluhkan lambannya penuntasan dualisme KNPI walaupun titik terang mulai terlihat, terbukti dengan hadirnya dua ketua KNPI yang bertikai yaitu Ahmad Dolly Kurnia dan Azis Syamsudin dalam konferensi *Poknas*. Sementara Achmad Suhawi Ketua Umum Pena mempertanyakan politik biaya tinggi yang muncul ditengah masyarakat. Kekawatirannya muncul image ditengah publik, politisi adalah pekerjaan yang dapat membuat kaya seseorang.

Menanggapi hal ini Ketua DPR menyebut penyelesaian dualisme KNPI bisa dilakukan apabila berani melaku-

kan terobosan. “Saya juga prihatin masalah ini tidak selesai-selesai. Bagi saya ini negara demokrasi kalau induknya tidak beres ya kita bentuk yang baru saja, apa dibentuk forum atau perserikatan itu namanya terobosan,” tandasnya.

Konflik KNPI menurutnya telah menghambat organisasi melaksanakan fungsi memberikan kemaslahatan bagi organisasi pemuda dalam membentuk calon pemimpin. Ada kecenderungan

KNPI terjebak masuk ke ranah politik. Ia menyambut baik apabila Poknas dapat mengisi kekosongan itu. “Kalau bentuk perserikatan bagus ini non politis, independen, tidak terafiliasi pada partai tertentu, betul-betul memperhatikan kepentingan pemuda. Jadi silahkan saja KNPI berjalan dalam kaitannya apa, Poknas juga berjalan mengusung visi bagaimana pemuda berperan dalam pembangunan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut Koordinator Poknas Aries Manjie didampingi Ketua Panitia Chairul Razak menyerahkan kepada Ketua DPR rekomendasi yang berhasil dihimpun dalam Konferensi Nasional dengan tema “Revitalisasi Peran Pemuda dalam Mengisi Pembangunan”. Disampaikan pula daftar 30 OKP yang secara resmi telah menyampaikan dukungan berdirinya Poknas. (iky) foto:parle

DPR-RI Meminta Pemerintah Lebih Kooperatif Dalam Pembahasan RUU

Dalam Pelaksanaan Fungsi legislasi, DPR-RI meminta kepada Pemerintah untuk lebih kooperatif, utamanya dalam pembahasan atas RUU yang berasal dari DPR baik sejak tahap penyampaian Surat Presiden (Surpres) hingga akhir pembahasan.

Hal ini menjadi sangat penting mengingat semua pembahasan RUU harus mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden sebagaimana amanat UUD 1945. Dengan landasan berpikir yang komprehensif, maka pelaksanaan fungsi legislasi dapat berlangsung optimal sebagai wujud pertanggung jawaban DPR kepada Rakyat.

Demikian salah satu butir Laporan kinerja DPR RI tahun 2010-2011 yang disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie pada rapat Paripurna DPR, di Gedung DPR RI, Selasa (6/9/2011).

Marzuki mengemukakan bahwa dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU, banyak kendala teknis maupun non teknis yang berdampak kepada lambatnya penyelesaian suatu RUU untuk disahkan menjadi UU. Di antaranya adalah sempitnya waktu, yang seringkali justru suatu RUU membutuhkan proses panjang dalam pembahasan, sedangkan Tata Tertib menentukan batas waktu pembahasan hanya dua kali masa persidangan dan dapat ditambah satu kali masa persidangan, dengan persetujuan Badan Musyawarah DPR, ujarnya.

Ditambahkan bahwa sulitnya memperoleh penyamaan pendapat antara DPR dan Pemerintah dalam hal substansi yang akhirnya menjadi materi yang cukup krusial adalah kendala non teknis yang sering di hadapi. Namun



Jajaran Pimpinan DPR RI

diakuinya hal tersebut wajar terjadi karena adanya upaya optimal dengan mempertimbangkan banyak kepentingan untuk mencapai kepentingan masyarakat dan bangsa yang lebih besar.

“Ke depan, kami (red-DPR) berusaha meminimalkan hambatan tersebut melalui komunikasi intensif dan keterbukaan yang dijalin dalam setiap pembahasan dan disiplin pembahasan semua anggota yang terlibat,” ujar Marzuki.

Untuk itulah, Pimpinan Dewan melakukan terobosan dan serangkaian langkah dalam upaya mengoptimalkan fungsi perundang-undangan. Keterlibatan Pimpinan Dewan dalam ikut menangani langsung beberapa RUU, konsultasi yang dilakukan secara

intensif dengan fraksi-fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan yang menangani RUU, dan bahkan konsultasi dengan Presiden, telah dilakukan. Keterlibatan ini tidak hanya dalam menyepakati substansi, tetapi juga dalam hal mekanisme dan prosedur untuk percepatan penyelesaian RUU.

Seperti diketahui bahwa Selama tahun 2011 sampai dengan akhir Masa Persidangan IV(15 agustus 2011) DPR RI telah melakukan pembahasan terhadap 23 RUU, baik RUU inisiatif DPR maupun RUU dari Pemerintah. Dan dari 23 RUU tersebut, 10 RUU di antaranya telah disetujui menjadi UU, terdiri dari 6 RUU berasal dari DPR dan 4 RUU berasal dari Pemerintah. (Iss) foto:iw/parle

Komisi IX DPR Minta Menakertrans Jujur Soal Dugaan Korupsi di Kemenakertrans

Anggota Komisi IX DPR RI Gandung Pardiman meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar memberikan penjelasan sejujur-jujurnya terkait kasus dugaan korupsi di kementeriannya pada Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID).



Rapat kerja Komisi IX dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar di Gedung DPR Senayan Jakarta

“Jabatan itu amanah, maka saya minta berikan keterangan sejujur-jujurnya, jangan ada kebohongan, jangan ada yang disembunyikan,” kata anggota komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini saat Raker Komisi IX dengan Menakertrans di Gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (8/9).

Menurut Gandung penjelasan Menakertrans harus sejujur-jujurnya agar persoalan dugaan korupsi ini bisa jelas. Sebelumnya KPK telah menangkap tangan pejabat Kemenakertrans dan seorang pengusaha yang menyeraikan uang sebesar Rp1,5 Miliar terkait program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Papua melalui DPID.

Charles Mesang Anggota Komisi IX, menyatakan maklum kekurangan dana pada Kemenakertrans. Namun Charles menyayangkan tidak adanya informasi

dari Kemenakertrans tentang dana program PPIDT sebesar Rp 500 Miliar. “Tentunya dana Rp 500 Miliar tidak turun langsung begitu saja, pastinya melalui proses,” kata Mesang.

“Jika hal tersebut dibicarakan dengan kami sejak awal, maka tentu kami bisa melakukan koreksi apakah 19 lokasi tersebut pantas menerima dana tersebut,” terang Mesang.

Sedangkan Risky Sadiq Anggota Komisi IX dari Fraksi PAN menyatakan bahwa selama ini dana percepatan pembangunan daerah tertinggal banyak memakan korban karena rawan penyelewengan. Oleh sebab itu, Risky meminta Kemenakertrans perlu meningkatkan pengawasan melekat kembali.

Risky juga mengingatkan Kemenakertrans, bahwa selama ini serinya program Kemenakertrans tidak diinformasikan kepada Komisi IX DPR RI

sebagai mitra kerja Kemenakertrans. Sementara saat memberikan penjelasan di depan Anggota Komisi IX DPR RI, Muhaimin Iskandar menyatakan, proses dan penentu tender pada program PPIDT bukan oleh Kemenakertrans.

Begitu juga pengguna anggarannya, bukan Kemenakertrans. Melainkan Pemerintah Daerah. Selain itu, pengawasan lapangan terhadap jalannya program tersebut juga bukan oleh Kemenakertrans.

“Tapi Bawasda. Bawasda melapor bukan kepada kami, tapi kepada Kementerian Keuangan,” ujar Muhaimin dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jakarta, Kamis 8 September 2011.

“Karena itu dalam logika pikiran saya. Saya sangat syok juga. Atas dasar apa seolah-olah Kemenakertrans bisa melakukan tender,” katanya.

Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA), kata Muhaimin, juga ada di Kabupaten. “Bahkan dinas pun belum tentu konator Dinas Transmigrasi. Contoh, pelaksana jalan bisa saja pak bupati,” ucapnya.

Menurut Muhaimin, kewenangan yang ada pada Kemenakertrans terbatas pada pengawasan standar. Muhaimin menjelaskan, anggaran yang akan dialokasikan pada PPIDT sebesar Rp500 miliar akan dipastikan mengalir kepada daerah-daerah di Indonesia.

Pada tanggal 13 September 2011 nanti, kata Muhaimin, daerah-daerah dikumpulkan oleh Kementerian Keuangan untuk dipastikan menerima. “Sebetulnya, menurut saya setelah tanggal 13 September itu pasti akan menjadi pembahasan mengenai pengawasan yang dilakukan Kemenakertrans,” imbuhnya. (sc) foto:sc/parle

Pemerintah Tidak Serius Menjalankan Program Road Map to Zero Accident

Pendapat tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR Abdul Hakim, di ruang kerjanya DPR RI, baru-baru ini.

Korban meninggal karena kecelakaan lalu lintas (laka lantas) menurut kriteria standar WHO adalah korban tewas di tempat dan korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dalam perawatan di rumah sakit hingga 30 hari sejak kejadian laka lantas terjadi.

“Bagaimana mungkin data angka kecelakaan terbaru yang diberitakan oleh harian nasional yang bersumber pada data di Kepolisian RI bisa meningkat, dengan jumlah yang signifikan hanya dalam jangka waktu 5 hari dengan angka kecelakaan dan korban-pada tahun 2010 berbeda?” ungkap Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.

Berita tanggal 1 September 2011 menyatakan bahwa Berdasarkan data dari National Traffic Management Center Polri, tahun ini terjadi 2.770 kecelakaan dengan 449 korban tewas, 760 orang luka berat, dan 1.914 orang luka ringan. Pada 2010, sesuai data yang dicuplik dari buku Mudik Asyik yang dikeluarkan Mabes Polri, jumlah kecelakaan selama sepekan arus mudik sebanyak 927. Korban tewas sebanyak 182 orang, luka ringan 497 orang, dan luka berat 261 orang.

Pemudik bersepeda motor terbanyak terlibat kecelakaan tahun ini, yaitu 2.371 kecelakaan, lebih banyak dibandingkan tahun lalu, 1.616 kecelakaan. Secara keseluruhan, jumlah kendaraan yang mengalami kecelakaan tahun ini 3.418 unit, meningkat berkisar 40 persen dibandingkan 2010, sebanyak 2.446 unit. Sedangkan berita tanggal 6 September 2011 menyatakan bahwa angka kecelakaan lalu lintas pada arus mudik dan balik Lebaran terus meningkat. Hingga Selasa (6/9/2011) pagi, Korps Lalu Lintas Polri mencatat jumlah kecelakaan mencapai 4.071 kasus dengan korban jiwa 682 orang.

Selain korban meninggal, terdapat pula 71 korban luka berat dan 189 luka

Ketidaktejelasan data korban kecelakaan pada periode mudik lebaran tahun 2011 ini menunjukkan bahwa Pemerintah tidak serius dalam melaksanakan program Road Map To Zero Accident yang merupakan perintah UU no. 22 tahun 2009.

ringan. Angka-angka tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Total kecelakaan lalu lintas pada 2010 dalam periode yang sama tercatat sebesar 2.625 kejadian. Adapun jumlah korban tewas tahun lalu mencapai 716 orang, korban luka berat 927 orang, dan korban luka ringan 1.804 orang.

Dia mengatakan, perbedaan data kecelakaan lalu lintas, baik data tahun 2010 maupun 2011 mengindikasikan adanya kecenderungan Pemerintah untuk menutup-nutupi fakta sebenarnya. Lebih jauh politisi senior yang dikenal sangat memperhatikan pelaksanaan paket Undang-Undang Transportasi yang dibidannya ini menegaskan bahwa Komisi V DPR RI perlu membuat Panitia Khusus untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap data kecelakaan lalu lintas.

“Hal ini perlu dilakukan, mengingat hasil penelitian Pustral UGM di tahun 2007 menyatakan bahwa kerugian negara akibat korban tewas karena kecelakaan lalu lintas adalah sebesar 3 persen GDP. Artinya, sangat signifikan dalam mengurangi capaian target pemerintah yang dilakukan dengan mengeluarkan anggaran yang besar”. jelas Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Lampung II ini.

Parameter keselamatan selama arus mudik lebaran ini menjadi tolak



Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hakim

ukur utama dari hasil penggunaan dana APBN sejak tahun 2009 untuk program keselamatan dan strategi manajemen lalu lintas yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Kepolisian RI. Oleh karena itu, sudah selayaknya Pemerintah bertanggung-jawab terhadap kerugian yang dialami masyarakat.

“Sudah saatnya Pejabat Pemerintah menyadari bahwa sebagian besar biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan ini berasal dari masyarakat. Sehingga, masyarakat berhak mendapat penjelasan yang sebenarnya terhadap angka kejadian kecelakaan lalu lintas dan jumlah korbannya,” jelasnya. (si)foto:parle

Pemerintah Harus Minta Maaf Atas Buruknya Layanan Mudik

DPR mendesak Pemerintah meminta maaf atas buruknya layanan mudik tahun 2011. Kualitas pelayanan mudik oleh pemerintah tahun ini dirasakan menurun dibanding tahun sebelumnya, baik dari sisi Keamanan, Kenyamanan dan Keselamatan.



Anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia



Demikian disampaikan anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia di Gedung DPR RI, se usai rapat kerja evaluasi mudik bersama jajaran Kementerian Perhubungan, Kamis, (8/9).

Lebih lanjut Yudi mengungkapkan, penurunan dari sisi Keamanan bisa

dilihat maraknya kasus kejahatan yang menimpa pemudik baik yang menggunakan bus maupun kereta. Kejadian pembajakan kereta api merupakan kasus yang paling menonjol disamping modus kejahatan lama seperti pencopetan dan hipnotis.

Sementara itu dari sisi kenyamanan,

hal yang paling dirasakan adalah meningkatnya keluhan akan kemacetan di berbagai ruas jalan di pulau Jawa. Termasuk beberapa jalur yang selama langganan macet juga belum menampakkan perbaikan. Meningkatnya volume kendaraan pada waktu yg sama berdampak pada kemacetan yang sangat luar biasa.

Yudi menyontohkan, waktu tempuh Jakarta-Solo menjadi 45 jam. Jakarta- Yogyakarta 43 jam. Demikian juga waktu tempuh Jakarta-Semarang dan Jakarta-Surabaya yang harus dijalani dua kali lebih lama. Kondisi juga terjadi pada jalur pendek yang menderita kemacetan hebat antara lain jalur Sukabumi-Ciawi ditempuh dgn waktu 18 jam dan Bandung-Tasik ditempuh dengan waktu 10 jam.

Sementara itu dari sisi keselamatan juga sangat memprihatinkan dengan meningkatnya kuantitas kecelakaan, khususnya darat dan laut. Untuk transportasi laut kejadian tenggelamnya KM windu karsa menjadi catatan buruk tahun ini. Untuk kecelakaan tol, yg menjadi perhatian adalah jalan tol Cipularang yang memakan korban jiwa cukup banyak, terutama saat arus balik. Data yang dikeluarkan Mabes Polri menunjukkan angka kecelakaan tahun ini mencapai 4.071 kejadian, meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang hanya 2.625 kejadian.

Kondisi yang memprihatinkan juga terjadi pada penyeberangan merak-Bakauhuni yang mengalami kemacetan signifikan. Peringatan dari berbagai kalangan termasuk Presiden SBY agar mewaspadai kondisi penyeberangan Merak tidak cukup membuat Kementerian Perhubungan sigap. (si) foto:si/parle

Perubahan dan Pergantian Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI masa sidang Tahun 2011-2012

Pimpinan Komisi I DPR RI

Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, Msi	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Ketua
Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	Fraksi Partai Golongan Karya	Wakil Ketua
TB. HASANUDDIN SE, MM	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua
H. HAYONO ISMAN. S.IP	Fraksi Partai Demokrat	Wakil Ketua

Pimpinan Komisi II DPR RI

H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH, MH	Fraksi Partai Golongan Karya	Ketua
Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.SI	Fraksi Partai Amanat Nasional	Wakil Ketua
GANJAR PRANOWO	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua
DRS. H. TAUFIQ EFFENDI	Fraksi Partai Demokrat	Wakil Ketua

Pimpinan Komisi III DPR RI

DR. BENNY KABUR HARMAN, SH	Fraksi Partai Demokrat	Ketua
Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, MT	Fraksi Partai Amanat Nasional	Wakil Ketua
DR. AZIZ SYAMSUDDIN	Fraksi Partai Golongan Karya	Wakil Ketua
FAHRI HAMZAH, SE	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Wakil Ketua

Pimpinan Komisi IV DPR RI

M. ROMAHURMUZIY, ST MT	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Ketua
HJ. ANNA MU'AWANAH, SE, MH	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua
FIRMAN SOEBAGYO, SE	Fraksi Partai Golongan Karya	Wakil Ketua
IR. E. HERMAN KHAERON, M.SI	Fraksi Partai Demokrat	Wakil Ketua

Pimpinan Komisi V DPR RI

DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	Fraksi Partai Amanat Nasional	Ketua
H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	Fraksi Partai Golongan Karya	Wakil Ketua
NUSYIRWAN SOEJONO, ST	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua
IR. H. MULYADI	Fraksi Partai Demokrat	Wakil Ketua

Pimpinan Komisi VI DPR RI

Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, MMT, MBA	Fraksi Partai Golongan Karya	Ketua
-	Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat	Wakil Ketua
ARIA BIMA	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua
IR. AGUS HERMANTO,MM	Fraksi Partai Demokrat	Wakil Ketua

Pimpinan Komisi VII DPR RI

H. TEUKU RIEFKY HARSA	Fraksi Partai Demokrat	Ketua
ZAINUDIN AMALI, SE	Fraksi Partai Golongan Karya	Wakil Ketua
ACHMAD FARIAL,	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Wakil Ketua
Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua

Pimpinan Komisi VIII DPR RI

H. ABDUL KADIR KARDING, SPI	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Ketua
Dra. Hj. CHAIRUN NISA, MA	Fraksi Partai Golongan Karya	Wakil Ketua
H. GONDO RADITYO GAMBIRO	Fraksi Partai Demokrat	Wakil Ketua
AHMAD ZAINUDDIN, LC	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Wakil Ketua

Pimpinan Komisi IX DPR RI

DR. RIBKA TJIPTANING	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Ketua
DRS H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Wakil Ketua
SOEPRIYATNO, IR	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	Wakil Ketua
DR.AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN	Fraksi Partai Demokrat	Wakil Ketua

Pimpinan Komisi X DPR RI

PROF. DR. H. MAHYUDDIN NS, SP.OG (K) + + +	Fraksi Partai Demokrat	Ketua
H. ASMAN ABNUR, SE. MSI	Fraksi Partai Amanat Nasional	Wakil Ketua
Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si	Fraksi Partai Golongan Karya	Wakil Ketua
DRS. UTUT ADIANTO	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua

Pimpinan Komisi XI DPR RI

Ir. H.I EMIR MOEIS, MSc	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Ketua
Dr. H. HARRY AZHAR AZIS, MA	Fraksi Partai Golongan Karya	Wakil Ketua
ACHSANUL QOSASI	Fraksi Partai Demokrat	Wakil Ketua
KH. DR. SURAHMAN HIDAYAT, MA	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Wakil Ketua



Pimpinan Badan Legislasi DPR RI

IGNATIUS MULYONO	Fraksi Partai Demokrat	Ketua
H. SUNARDI AYUB, SH	Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat	Wakil Ketua
DRA. HJ. IDA FAUZIYAH	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua
ACHMAD DIMYATI N., SH, MH, M.Si	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Wakil Ketua

Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI

DR. H. MARZUKI ALIE	Fraksi Partai Demokrat	Ketua
PIUS LUSTRILANANG, S.IP, M.SI	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	Wakil Ketua
DR. INDRAWATI SUKADIS	Fraksi Partai Demokrat	Wakil Ketua
REFRIZAL	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Wakil Ketua

Pimpinan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI

DR. MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Ketua
Ir. H. AZWAR ABUBAKAR, MM	Fraksi Partai Amanat Nasional	Wakil Ketua
Drs.SIDARTO DANUSUBROTO, SH	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Wakil Ketua
DR. NURHAYATI ALI ASEGGAF,M.SI	Fraksi Partai Demokrat	Wakil Ketua

Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI

H. AHMAD MUZANI	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	Ketua
MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.IP., MM	Fraksi Partai Demokrat	Wakil Ketua

Pimpinan Badan Kehormatan (BK) DPR RI

DR. MUHAMMAD PRAKOSA	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Ketua
DR. (Hc) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	Fraksi Partai Golongan Karya	Wakil Ketua
H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH	Fraksi Partai Demokrat	Wakil Ketua

Ketua DPR Gelar Open House Idul Fitri 1432 H

Usai menghadiri Open House di Istana Negara dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga, serta Wakil Presiden dan Ibu Herawati Budiono di kediamannya, Ketua DPR RI dan Ibu Asmawati Marzuki Alie mengadakan acara Silaturahmi Idul Fitri 1432H di rumah dinas Ketua DPR di Jl. Widya Chandra III No. 10 Jakarta.



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menerima tamu pada acara Open House Idul Fitri 1432 H di rumah dinas Ketua DPR di Jl. Widya Chandra III No.10 Jakarta

Sejumlah tamu yang terdiri atas anggota DPR dan DPD RI, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Duta Besar negara sahabat, keluarga, para sahabat, dan handai taulan tampak memenuhi aula belakang kediaman ketua DPR di kompleks Pejabat Tinggi Negara ini.

Atas nama Ketua DPR RI dan keluarga, H. Marzuki Alie menyampaikan ucapan selamat merayakan hari raya Idul Fitri 1432 H, seraya memohon maaf lahir bathin atas segala kesalahan, dan berharap ibadah satu bulan penuh selama bulan Ramadhan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari pada 11 bulan lainnya. “InsyaAllah kita semua mendapat derajat taqwa, dicintai dan mendapat ridhonya,” harapnya.

Mengutip apa yang dikatakan Dr. Quraish Shihab saat menyampaikan khutbah Idul Fitri di Masjid Istiqlal mengenai pemimpin yang harus mem-

berikan kebiasaan yang baik itu akan membawa dampak bagi bangsa dan negara kita,” ucapnya.

Saat ditanya sejumlah wartawan yang turut hadir pada Open House tersebut mengenai makna Idul Fitri, Ketua DPR mengatakan, Idul Fitri bagi yang melaksanakan ibadah Ramadhan memberi makna yang sangat dalam, karena telah sampai pada hari kemenangan atas perang melawan hawa nafsu selama sebulan penuh dan kembali kepada fitrah. “Kita seperti bayi yang baru dilahirkan”, tegasnya. Dia menambahkan, Ramadhan juga merupakan sarana yang disediakan Allah



beri contoh kebaikan kepada umat, Ketua DPR mengatakan, kebiasaan-kebiasaan saat Ramadhan jika dilakukan pada bulan-bulan pasca Ramadhan InsyaAllah akan membawa kebaikan. “Kebiasaan-kebiasaan yang baik itu harus selalu dilakukan. Mudah-mudah-

untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan setelah beraktivitas pada 11 bulan lainnya. Marzuki berharap kebiasaan-kebiasaan baik saat bulan Ramadhan dapat dilakukan pada bulan-bulan lainnya. (Rn.Wrj.Tvp) foto: Rn.Wrj/parle

Pramono Anung Akan Jadi Inisiator RUU Profesi Insinyur

Lebih lanjut Pramono mengatakan, jika draft RUU Profesi Insinyur telah dilakukan perbaikan dan penyelesaian, tentunya kami akan langsung mengawal RUU tersebut, tetapi kami ingatkan, jangan sampai isi dari RUU tersebut nantinya ada yang merugikan profesi keinsinyuran sendiri.

Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia (PII) yang di ketuai Oleh Said Didu mendatangi DPR guna mendorong segera disahkannya Draft Rancangan Undang Undang (RUU) Profesi Insinyur. “Undang-undang Profesi Insinyur telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia di tengah liberalisasi sektor industry, jasa dan perdagangan yang akan diberlakukan di ASEAN pada tahun 2015, untuk itu kami mengharapkan agar RUU Profesi Insinyur ini dapat segera disahkan oleh DPR,” harap Said.

Berdasarkan keputusan Asean Summit, para Insinyur di Asean akan masuk ke Indonesia dengan sangat bebasnya tanpa ada undang-undang yang mengaturnya. “Pesatnya pembangunan di infrastruktur Indonesia akan menarik minat para insinyur Negara Asean untuk bekerja di Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu keberadaan Insinyur asing di Indonesia pun perlu ada aturan mainnya yang jelas,” tegas Said.

Menanggapi hal tersebut, Airlangga mengatakan, Rancangan undang-undang tersebut dapat segera disahkan jika naskah akademisnya telah selesai dikerjakan, dan lebih baik lagi jika Rancangan Undang-undang maupun Daftar inventarisasi Masalahnya pun telah disusun.

“Jika draftnya sudah diselesaikan, tentunya akan langsung kami pelajari dan akan kami teruskan ke komisi-komisi lain yang bersangkutan, karena RUU Profesi Insinyur ini lintas sektoral, jadi bisa menyangkut komisi-komisi lainnya,” jelasnya.

Ignatius menambahkan, RUU Profesi Insinyur ini memang sangat dibu-

“Saya akan menjadi inisiator dan penandatanganan pertama untuk pengesahan draft RUU Profesi Insinyur,” tegas Pramono Anung (Wakil Ketua Bidang Korinbang DPR RI), saat menerima Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia (PII) yang ditemani oleh Ketua Komisi VI, Airlangga Hartarto dan Ketua Badan Legislasi, Ignatius Mulyono di Ruang Rapat Pimpinan, Nusantara III, Kamis (8/9).



Wakil Ketua Pramono Anung (kanan) saat menerima Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia (PII)



tuhkan untuk lingkungan keinsinyuran di masa mendatang, karena agar ada standar khusus guna peningkatan kompetensi bagi para insinyur di Indonesia. “Dengan adanya RUU ini, nantinya akan meningkatkan kualitas profesi insinyur yang tentunya agar dapat bersaing dengan insinyur dari Negara lainnya,” terangnya.

Akhir pertemuan Pramono mengatakan, semakin cepat draft final RUU Profesi Insinyur ini masuk ke DPR, maka akan semakin cepat juga proses pengesahan dijalankan. Karena RUU ini tidak akan bermuatan politis, sehingga mudah untuk merealisasikannya. (ra) foto:ra/parle

HUT DPR RI Ke-66

“ KOMITMEN DPR RI TERHADAP PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN “ Demikian tema yang di usung DPR dalam memperingati Ulang Tahunnya yang ke-66, yang menggambarkan keteguhan DPR terhadap perlunya secara terus menerus dilakukan peningkatan kapasitas lembaga DPR, lembaga wakil rakyat, tempat melaksanakan tugas bagi bangsa dan negara.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie di depan Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka peringatan HUT ke-66 MPR/ DPR RI dan laporan kinerja DPRRI tahun sidang 2010-2011, di gedung Nusantara II Senayan Jakarta Pusat, Selasa (6/9).

Marzuki mengemukakan, berbagai upayadan langkah perlu dilakukan bagi optimalisasi kinerja DPR dalam melak-

dasarnya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan fungsi legislasi Tahun Sidang 2009-2010. Penetapan program prioritas legislasi tahunan tahunsidang 2010, meliputi 70 RUU terdiri dari 36 RUU inisiatif DPR dan 34 inisiatif Pemerintah.

Lebih lanjut dikatakan, untuk program prioritas tahunan tahun sidang 2011 berjumlah 91 RUU, terdiri dari 37 RUU usul inisiatif DPR, 33 RUU inisi-

DPD dalam memberikan kontribusi cukup positif, baik dalam usulan penetapan Prolegnas Prioritas Tahunan maupun dalam proses pembahasan RUU, DPD-RI juga telah memberikan usulan beberapa RUU kepada DPR mealalui Badan Legislatif (Baleg) DPR.

Ketua DPR Marzuki Alie juga mengakui, dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU, banyak kendala yang dihadapi. Kendala-kendala ini berdampak kepada lambatnya penyelesaian suatu RUU untuk disahkan menjadi UU, ungkap Marzuki.

Dalam Persidangan I DPR juga telah melakukan beberapa fungsi pengawasan antara lain Tim Pengawas Century, Tim Khusus DPR terhadap Penanganan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Saudi Arabia, Tim Pengawas Otonomi Khusus Aceh dan Papua, juga ada Tim Pengawas DPR terhadap Penanggulangan Bencana Alam (PBA) yang terjadi di Propinsi Jawa Barat, Propinsi Sumatera Barat, dan Propinsi Jambi.

Marzuki Alie juga menambahkan, selama masa persidangan 1 sampai IV, DPR telah membentuk beberapa Panitia Kerja (Panja) antara lain Panja Mafia Pemilu, Panja Aset-aset Negara, Panja Alat Utama Sistem Persenjataan, dan Panja Sistem Pelayanan Kesehatan Dasar dan Sistem Rujukan.

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, bahwa DPR sepakat dan bertekad serta berupaya untuk memperbaiki kinerja sebagaimana menjadi tuntutan masyarakat. Upaya tersebut telah dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) DPR 2010-2014 yang merupakan dokumen perencanaan strategis yang pertama kali dimiliki sepanjang sejarah DPR.

Renstra ini menjadi dokumen bagi DPR dalam menyusun program dan kegiatan, guna menyelenggarakan tugas-tugas konstitusional DPR, dan Sekretariat Jenderal DPR dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPR, kata Marzuki Alie. (Lss-Spy). foto:iw/parle



Ketua DPR RI saat membuka acara HUT DPR RI Ke-66 dengan pemotongan tumpeng

sanakan fungsi-fungsinya, yang telah mendapatkan dukungan dan penguatan, baik melalui amandemen UUD 1945 maupun perundangan lainnya.

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan banyak mendapatkan kritik namun semua kritik harus dijawab, tidak hanya dalam bentuk argumentasi pembenaran, tetapi dengan langkah-langkah nyata”, tegas Marzuki.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa dalam pelaksanaan fungsi legislasi dalam Tahun Sidang 2010-2011, pada

atif Pemerintah dan 21 luncuran RUU tahun 2010. Selama tahun 2010, RUU yang dilakukan proses penyusunan/ perumusan di DPR berjumlah 16, tahun 2011 berjumlah 30 RUU.

Selama tahun 2011 sampai dengan akhir masa persidangan IV, telah dilakukan pembahasan terhadap 23 RUU, baik RUU inisiatif DPR maupun dari Pemerintah. Dari 23 RUU tersebut 10 RUU diantaranya telah disetujui menjadi UU.

Marzuki Alie menegaskan, dalam menjalankan fungsi ini, keterlibatan

Timus Laporkan RUU Pemilu Ke Panja Komisi II

Tim Perumus (Timus)/Tim Sinkronisasi (Timsin) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu melaporkan hasil pembahasannya kepada Panja Komisi II DPR.

Ketua Timus/Timsin RUU Pemilu, Ganjar Pranowo mengatakan ada beberapa substansi yang telah disepakati di forum Panja, namun dilakukan perubahan dan penyempurnaan serta penambahan substansi. “Oleh karena itu kami laporkan substansi-substansi tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari forum Panja,” katanya di ruang rapat Komisi II, Kamis (8/9).

Beberapa perubahan dan penyempurnaan serta penambahan substansi tersebut antara lain adalah disepakati bahwa RUU ini merupakan “RUU Penggantian” karena perubahannya sudah melebihi 50 persen atau 83 perubahan.

Adanya perubahan pengertian Penyelenggara Pemilu yakni lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu.

Selain itu, adanya kesepakatan perubahan sifat pengawas pemilu di provinsi bersifat permanen yang kemudian merubah nomenklatur dari “Panwaslu Provinsi” menjadi “Bawaslu Provinsi” dengan alasan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan sebagai konsekuensi logis dari peningkatan kewenangan Bawaslu sesuai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi bahwa Bawaslu adalah unsur penyelenggara pemilu.

Konsekuensi dari pembentukan “Bawaslu Provinsi” yang bersifat tetap atau permanen mengakibatkan nomenklatur “Panwaslu Provinsi” berubah menjadi “Bawaslu Provinsi” dan berimplikasi pada perubahan-perubahan diantaranya terkait dengan “Pembentukan/Proses Seleksi”, Kesekretariatan Bawaslu Provinsi, tugas,

wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi serta masalah Pendanaannya dalam APBN.

Perubahan dan penyempurnaan lainnya yang dilakukan Timus/Timsin adalah penambahan tugas, wewenang dan kewajiban KPU, KPU Provinsi dan

Parpol yang ada di DPR, Pemerintah, serta perwakilan masyarakat.

Terhadap dua substansi krusial yang harus diselesaikan dengan forum lobi yaitu jangka waktu pengunduran diri calon anggota KPU dan Bawaslu yang berasal dari Partai Politik dan kei-



Ketua Timus/Timsin RUU Pemilu Ganjar Pranowo (Kiri)

KPU Kabupaten/Kota, perubahan persyaratan calon anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perubahan persyaratan calon anggota Bawaslu, Bawaslu provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan dan perubahan dan penambahan tentang Tim seleksi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Ganjar menambahkan, tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu disepakati bahwa merupakan kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang memiliki tugas memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemilu. Adapun unsur keanggotaannya sesuai hasil lobi tanggal 6 September, ada unsur KPU, Bawaslu,

kutsertaan Pemerintah dalam Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), telah disepakati bahwa calon anggota KPU atau Bawaslu yang berasal dari partai politik harus mundur pada saat mendaftar dengan jaminan bahwa setelah selesai menjabat (selama 5 tahun) yang bersangkutan berhak untuk menduduki jabatan lainnya.

Terkait dengan proses penghitungan dan rekapitulasi suara, disepakati bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) kembali memiliki kewenangan untuk melakukan rekapitulasi perolehan suara yang berasal dari setiap TPS di wilayah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar kontrol perolehan suara setiap tingkatan dapat lebih dipantau dan diawasi. (tt) foto: tt / parle

Anggota Komisi V Tinjau Tol Cipularang Km. 96 dan Km. 93

Terkait banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan Tol Cipularang antara Kilometer (Km) 90 - 100 baru-baru ini, dua anggota Komisi V DPR RI, Yoseph Umarhadi dan Hj. Sadarestuwati (F-PDIP) meninjau lokasi kecelakaan di Km. 93 dan Km. 96 (Rabu 7/9).



Jalan Tol Cipularang

Turut mendampingi peninjauan tersebut Direktur Operasi PT. Jasa Marga (Persero) Ir. Adityawarman dan Kepala Cabang PT. Jasa Marga (Persero) ruas Purbalenyi, Ir. Hardjono Santoso, serta beberapa orang mewakili Badan Penyelenggara Jalan Tol (BPJT).

Seperti diberitakan media, Sabtu lalu (3/9) kecelakaan tunggal menimpa mobil Toyota Avanza B1843UFU yang dikemudikan artis Saipul Jamil di Km. 96, mobil membawa 9 orang keluarganya termasuk istrinya Virginia yang menjadi korban tewas, sementara yang lain luka-luka berat dan ringan. Kecelakaan yang terbaru terjadi pada hari Rabu (7/9) menimpa kendaraan minibus travel berisi 18 orang, menabrak truk di Km 93+100 pada pukul 04.05 WIB saat semua penumpang tertidur lelap. Kecelakaan menewaskan 6 orang penumpang yang berasal dari Kebumen Jawa Tengah yang sedang

menuju Jakarta usai libur lebaran.

Kacab Tol Purbalenyi Ir. Hardjono Santoso mengatakan umumnya kecelakaan yang terjadi di ruas Tol Purbalenyi karena pengemudi mengantuk, kelebihan muatan dan kendaraan yang tidak laik jalan. "Pengakuan sejumlah pengemudi yang mengalami kecelakaan di Tol Purbalenyi saat diperiksa Polisi adalah karena mengantuk", jelasnya. Direktur Operasi PT. Jasa Marga, Ir. Adityawarman mengatakan, untuk mengatasi kelelahan, pihak Jasa Marga telah membuat beberapa tempat istirahat (rest area) dan menambah rambu-rambu peringatan. "Ruas Tol pada Km. 90 - Km. 100 memang cenderung landai dengan turunan yang tidak curam, sehingga tidak terasa kecepatan kendaraan bertambah, sementara di Km 97 dan 96 ada tikungan, ini yang sering kurang diantisipasi para pengemudi," ujarnya menjelaskan. Aditya menambahkan

pada ruas tersebut kecepatan yang dianjurkan maksimum 80 Km/jam.

Anggota Komisi V DPR RI, Sadarestuwati mengatakan, jalan tol Purbalenyi mempunyai kontur yang bergelombang dan berkelok-kelok, jika pengemudi kurang konsentrasi dapat berakibat fatal. "Tiupan angin di beberapa ruas juga cukup kencang, pihak Jasa Marga perlu mengantisipasi hal ini, misalnya dengan membuat penahan angin di kanan-kiri jalan," ujarnya. Sadarestuwati menambahkan, rambu-rambu peringatan perlu ditambah dan diperbesar terutama pada ruas-ruas yang rawan kecelakaan.

Anggota Komisi V DPR RI, Yoseph Umarhadi mengatakan kedisiplinan pengemudi dalam berkendara serta kesiapan fisik dan mental sangat dibutuhkan terutama jika hendak bepergian jarak jauh. "Perlu konsentrasi penuh dalam mengemudi," tegasnya. Kepada pihak Jasa Marga, Yoseph meminta agar menambah rambu-rambu peringatan di tempat-tempat yang rawan kecelakaan dan menambah bahu jalan untuk kondisi darurat. Kepada pihak BPJT, Yoseph meminta agar membuat analisis mengenai infrastruktur jalan tol Purbalenyi untuk memberi masukan kepada menteri. "Pihak BPJT perlu melakukan analisis menyeluruh mengenai kondisi terkini jalan tol Purbalenyi ini, karena kita tidak ingin korban berjatuh lagi," tandasnya.

Usai meninjau lokasi kecelakaan di Km. 93 dan 96, rombongan mengunjungi korban kecelakaan yang masih dirawat di RS. Efarina Etaham Purwakarta. Di RS ini masih dirawat 3 orang kerabat Saipul Jamil dan 1 orang korban minibus travel yang baru saja menjalani operasi. (Rn.Tvp) foto:Rn

Pameran Foto Meriahkan HUT DPR RI

500 foto karya 25 jurnalis yang tergabung dalam Wartawan Foto Parlemen Indonesia ditampilkan dalam pameran foto memperingati ulang tahun MPR/DPR ke 66.

Kegiatan yang berlangsung di lobi gedung Nusantara II, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9) dibuka secara resmi oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Didampingi jajaran Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, Anis Matta dan Taufik Kurniawan, peresmian diikuti meninjau secara langsung foto-foto yang ditampilkan. “Ini luar biasa ya ekspresinya,” komentar Ketua DPR ketika memperhatikan foto yang menggambarkan ia sedang memimpin sidang paripurna yang diwarnai protes anggota sampai naik ke mimbar pimpinan.

Pameran foto dengan tema “Warna-Warni Parlemen 2011” ini memang merekam ragam kegiatan anggota DPR mulai dari menghadiri persidangan, menerima pengunjung rasa



Jajaran Pimpinan DPR RI saat meninjau pameran foto memperingati HUT DPR RI Ke-66



sampai konperensi pers di ruang wartawan. “Ngambilnya pintar-pintar ya anak-anak,” imbuh Priyo. Ia tersenyum lebar ketika melihat salah satu foto dirinya yang dipotret wartawan di depan mobil dinas RI 52.

Komentar dan derai tawa semakin

menghangat ketika menyaksikan foto rapat paripurna pengesahan RUU Gerakan Pramuka. Dalam foto itu terlihat empat pimpinan sedang menyalami Menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Malarangeng. Ketika Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyadari dirinya

tidak terlihat dalam foto itu, iapun memberi tanggapan, “Wah ini foto pertemuan pimpinan koalisi di DPR nih.” Komentar ini disambut tawa pengunjung pameran.

Sebelumnya Ketua Panitia Pameran Foto, Charles Ulag menjelaskan seluruh karya yang ditampilkan dalam pameran memang sengaja dipilih mengekspresikan banyak hal seperti keindahan, lucu bahkan dramatik. Ia menambahkan karena keterbatasan tempat dari 500 foto hanya 103 yang bisa dipajang, sisanya ditampilkan dalam bentuk slide show.

Charles yang juga wartawan foto harian Suara Pembaruan memberikan masukan kepada Sekjen DPR terkait tidak optimalnya pencahayaan di ruang persidangan. “Ada satu hal yang menurut kami mengganggu dan membuat kerja kreatif kami tidak maksimal yaitu lampu di ruang sidang yang redup, kami terpaksa menggunakan lampu blitz,” ujarnya. Ia berharap pameran foto ini dapat dilaksanakan berkesinambungan, paling tidak setahun sekali. (iky) foto:iw/parle

Peringatan HUT DPR RI Ke-66

Dalam Gambar

